

**FORMULIR  
PENGAJUAN USULAN BARU STANDAR DATA STATISTIK**

Unit Kerja : Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  
 Direktorat : Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  
 Subdirektorat/ Koordinator : -

No.	Konsep Variabel	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	Pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi di Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha. Pengklasifikasian yang dilakukan bertujuan untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.	-	-	-	Peraturan BPS No. 2 tahun 2020 tentang KBLI

No.	Konsep Variabel	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Provinsi	1. Wilayah 2. Provinsi	Nama wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi.	1. Kode Item Klasifikasi 2. Nama Item Klasifikasi	-	-	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
3.	Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	Badan usaha milik desa yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa	-	Jumlah	Unit	1. PP 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa 2. Permendesa No 3 Tahun 2021
4.	Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama)	Badan Usaha Milik Desa Bersama	Badan usaha milik desa yang didirikan oleh beberapa desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi	-	Jumlah	Unit	1. PP 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa

No.	Konsep Variabel	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(BUM Desa Bersama)	dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa				2. Permendesa No 3 Tahun 2021
5.	Kabupaten/Kota	1. Kabupaten 2. Kota	Nama wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota.	1. Kode Item Klasifikasi 2. Nama Item Klasifikasi	-	-	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

